



KARCIS - Seorang warga menunjukkan karcis parkir yang tidak sesuai dengan aturan.

Pengawasan untuk Jukir Masih Lemah

- **ORI DIY Layangkan Surat ke Dinas Perhubungan Soal Tarif Parkir**

YOGYA, TRIBUN - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY telah menyuarakan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta terkait tarif parkir mahal. ORI menilai, pemerintah lemah dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap juru parkir (jukir).

Kepala ORI DIY Budhi Masturi membenarkan beberapa hari lalu telah menandatangani surat permintaan klarifikasi kepada Dishub mengenai tarif parkir. Melalui surat tersebut ORI meminta penjelasan terkait pungutan parkir yang tidak sesuai ketentuan.

"Dulu pada Juli 2016 kita juga sudah melayangkan surat

Patut diduga pemerintah belum optimal atau lemah dalam mengawasi dan menindak jukir yang menerapkan tarif tidak sesuai ketentuan, entah itu jukir resmi maupun ilegal," tegasnya

● ke halaman 14

Pemkot Lemah Hadapi Juru Parkir

● Sambungan Hal 13

ke Dishub dan sudah menerima penjelasan oleh kepala Dishub Kota Yogyakarta mengenai pembinaan terhadap jukir, namun ternyata masih terjadi lagi," ungkap Budhi saat dihubungi *Tribun Jogja* pada Senin (9/1).

Dari laporan masyarakat tentang tarif parkir yang meroket saat musim liburan, Budhi menyebut belum menemukan adanya pembiaran para jukir oleh Dishub. Namun ia menegaskan, perlu ada kecurigaan bahwa pemerintah lemah dalam melakukan pengawasan terhadap jukir.

"Patut diduga pemerintah belum optimal atau lemah dalam mengawasi dan menindak jukir yang menerapkan tarif tidak sesuai ketentuan, entah itu jukir resmi maupun ilegal," tegasnya.

Persoalan krusial

Baginya, ini merupakan persoalan penting yang mempengaruhi citra Kota Yogyakarta sebagai destinasi

wisata. Sistem perparkiran yang buruk dapat membebankan citra yang buruk pula dalam pelayanan pemerintah Kota Yogyakarta maupun pemerintah DIY.

"Perparkiran yang tidak dikelola secara baik, dalam hal pembinaan, penertiban, dan penindakan jukir, dapat membentuk image yang buruk bagi Yogyakarta," ungkap Budhi.

Aktivis sosial dan peduli lingkungan Yogyakarta Elanto Wijoyono sebelumnya telah melayangkan laporan kepada ORI DIY perihal tarif parkir yang melambung tinggi. Harapannya, melalui ORI DIY, Dishub dan Dinas Ketertiban (Dintib) bisa berani melakukan penindakan pelanggaran.

"Harapannya pemerintah Kota Yogyakarta bisa membuat sistem penyelenggaraan parkir yang lebih ketat. Perda dan Perwal sudah ada, tapi penerapannya banyak celah," tutur Elanto.

Klaim Dishub

Kepala Dishub Kota Yogyakarta Wirawan Hario Yudo, mengklaim telah melaksanakan pengawasan dan pembinaan pada seki-

tar 900 jukir di tepi jalan umum. Pembinaan ini ditujukan agar para jukir tidak mematok tarif parkir dengan sangat tinggi.

"Banyak yang melakukan aji mumpung saat momen-momen semacam liburan panjang. Namun, ini adalah ulah dari oknum jukir ilegal," ucapnya.

Wirawan juga menambahkan, adanya parkir liar ini tak lain karena terbatasnya kantong parkir yang disediakan oleh Pemkot. Sehingga, muncul kantong parkir liar yang memakan trotoar jalan, dan juga depan rumah warga.

Kepala Dintib Kota Yogyakarta Nurwidihartana, membenarkan jika telah menerima sejumlah aduan dan laporan terkait tarif parkir yang tinggi di Yogyakarta. Meski demikian, dia mengaku tidak hafal ada berapa aduan yang diterimanya.

"Yang pasti, sejauh ini kami telah melangkah dengan membina 45 jukir dan dua orang jukir kami sidangkan. Hal ini karena kami mendapatkan aduan dari masyarakat pada bulan Desember 2016 lalu," ujarnya. (gil/ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 26 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005